

ANALISIS KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BOGOR (STUDI BERDASARKAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG DESA LIGARMUKTI)

Sintia Adela¹, Irawati^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : sintiaadela23@gmail.com¹ , ira.yrawatty@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Analysis, Land and Building Tax, Compliance

Land and Building Tax is a tax imposed on individuals who own land, whether managed or unmanaged. Land and Building Tax is a standalone tax, and its revenue belongs to the largest category. This research aims to analyze the compliance with Land and Building Tax payment in Bogor Regency, specifically in Ligarmukti Village. In this study, the researcher aims to determine the extent of tax compliance among residents residing in Ligarmukti Village and identify factors preventing the compliance rate in Ligarmukti Village from reaching 100%. This is a qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results of this research indicate that there is a significant number of residents who are negligent in paying taxes, and there is a lack of socialization regarding the importance of tax payment.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang ada didunia. Sebagai Negara berkembang Indonesia memiliki beberapa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui program-program pembangunan nasional. Program pembangunan nasional tersebut tentunya meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Tentunya dalam pengelolaan program pembangunan nasional tersebut pemerintah sebagai lembaga Negara yang sah memiliki system dan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah berperan penting dalam mengorganisasikan masyarakat yang hidup dalam suatu wilayah, artinya pemerintah dikatakan sebagai pemimpin. Sebagai seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar serta harus berlaku adil pada semua lini masyarakat tak terkecuali pada keluarganya. Pembangunan nasional merupakan sebuah program besar dari pemerintah dengan skala nasional, untuk itu biaya yang diperlukan untuk mendanai berbagai program tentunya sangat banyak. Pemerintah memerlukan sumber dana sebagai pendapatan Negara yang nantinya akan di alokasikan pada kegiatan pembangunna nasional. Terdapat berbagai macam sumber penerimaan yang dapat diperoleh Negara salah satunya dan yang terbesar berasal dari pajak. Pajak adalah pemungutan atau iuran yang dibayarkan oleh masyarakat untuk negara yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan mayarakat umum dan sifatnya wajib (memeksakan). Pajak juga merupakan sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas pemilikan dan atau pemanfaatan bumi dan bangunan di Indonesia. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia didasarkan pada pemikiran bahwa

bumi dan bangunan memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari 3 manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.

Manfaat Pajak Bumi dan Bangunan bagi masyarakat yaitu yang sudah kita ketahui bahwasannya pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Dimana uang pajak dipergunakan untuk pengeluaran pegawai dan pembiayaan pembangunan. Dengan rutin membayar pajak, pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, serta rumah sakit akan lebih mudah terwujud. Tidak hanya itu, pajak juga berguna untuk subsidi bahan bakar pangan dan minyak bumi, pelestarian lingkungan dan budaya, dana pemilu, serta dana buat pengembangan indera transportasi umum. Oleh sebab itu, rutin membayar pajak sangat diperlukan, karena kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Kepatuhan pajak di desa ligarmukti masih kurang patuh bisa kita lihat dari pembayaran pajak di desa petung setiap tahunnya mengalami penurunan dibawah ini data tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan desa ligarmukti.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Adminitrasi Perpajakan** : Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 91) “ Administrasi perpajakan merupakan proses yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus dalam kegiatan pemungutan 21 pajak dengan melibatkan kerja sama sumber daya manusia yang tersedia baik fisik maupun wajib.” Pendapat lain juga dikemukakan oleh Sophar Lambatoruan dalam Siti Kurnia rahayu (2017:91) “Adminitrasi perpajakan (Tax Administration) adalah cara cara atau prosedur peneanaan dan pemungutan pajak.”
2. **Pengertian Analisis** : Menurut Sugiono (2015 : 335) pengertian analisis adalah sebagai berikut : “Analisis adalah kegiatan untuk mencari pola, atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, serta hubungannya dengan keseluruhan.” Sedangkan menurut Satori dan Komariyah (2014 : 200) mendefinisikan Analisis sebagai berikut : “Analisis adalah usaha untuk mengurai suatu masalah menjadi bagian bagian, sehingga susunan tersebut tampak jelas dan 22 kemudian bisa ditangkap maknanya dan dimengerti duduk perkaranya.”
3. **Kepatuhan wajib pajak** : Menurut Gunadi (2005:57) kepatuhan wajib pajak adalah: “Kepatuhan Wajib pajak adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.” Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138). Sedangkan menurut Djoko Slamet (2004) Kepatuhan perpajakan berarti sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.
4. **Pajak Bumi Dan Bangunan** : Menurut Suandy (2006:353) pengertian bumi sebagai berikut “Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, bangunan adalah kontruksi Teknik yang ditaman atau diletakan secara tepat pada tanah atau perairan, termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplesemnya, jalan tol, kolam renang, pagar mewah,tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minya, ait dan gas, pipa minyak, fasilitas lian yang memberi manfaat”.

5. **SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) SPPT** : adalah bentuk surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait pajak yang terutang selama satu tahun pajak. SPPT ini sudah diatur dalam UU No. 12 Tahun 1994 yang secara khusus mengatur Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan UU tersebut, SPPT adalah dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan. Pada umumnya, SPPT didapatkan sekaligus dengan Izin Memberikan 44 Bangunan (IMB) dan juga sertifikat. Namun, perlu diingat bahwa SPPT tidak termasuk atau dikategorikan sebagai bukti kepemilikan objek pajak. SPPT adalah penentu atas objek pajak tersebut dan patokan jumlah pajak yang dibebankan terhadap objek pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik. Oleh karena itu, terkadang ada perbedaan nama antara nama yang tercantum di sertifikat kepemilikan rumah dengan nama yang tercantum di SPPT PBB. Hal ini bisa saja terjadi karena pemilik awal tidak melakukan peralihan atau balik nama sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara mendalam dengan para Informan diantaranya: Kepala Desa Ligarmukti, Akademisi dan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek peneliti yang merupakan sumber data, untuk mendapatkan hasil yang sebenarnya, sehingga data yang diperoleh benar-benar objektif. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan mengumpulkan data secara langsung ke lapangan atau tempat yang 92 diselidiki untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Analisis Kepatuhan Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Bogor (Studi Kasus Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Desa Ligarmukti). Pada pembahasan ini, berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti akan menganalisis hasil dari penelitian yang berhubungan dengan Analisis Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Ligarmukti. Dalam mengukur kepauhan, peneliti menggunakan teori kepatuhan Sri Kurnia Rahayu dimana kepatuhan dapat diukur dalam tujuh indikator yaitu :

- 1) Kondisi sistem administrasi perpajakan

Kondisi sistem administrasi merupakan langkah awal dalam meningkatkan kepatuhan karna jika sistem yang memudahkan untuk membayar pajak dan sarana yang memudahkan masyarakat dalam membayar pajak akan menambah kenyamanan dalam membayar pajak. Untuk kondisi sistem administrasi yang dijalankan oleh Desa Ligarmukti. Untuk sistem administrasi sendiri masih menggunakan sistem manual dengan cara mengirimkan data, hal ini didampai langsung oleh Bapak Samin sebagai Kepala Desa. “Untuk sistem administrasi di Desa masih dengan mengirimkan berkas ke UPT dari UPT dialihkan ke BAPPENDA”

- 2) Kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak

Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Pemkab Bogor saat ini sangat mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam hal teknologi yang akan memudahkan masyarakat dalam pengecekan total jumlah kewajiban wajib pajak yang terutang, dengan diluncurkannya aplikasi berupa PBB Online yang dikembangkan oleh Pemkab. Akan tetapi untuk wilayah desa Ligarmukti sendiri belum diberlakukannya penggunaan PBB Online dikarenakan terdapat kendala sinyal yang kurang bagus dan banyak beberapa masyarakat yang tidak paham bagai mana cara menggunakan smartphone, sehingga masyarakat mengandalkan petugas desa yang akan menagih dan menyebarkan SPPT kesetiap wajib pajak. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Samin Kepala Desa Ligarmukti. "Untuk Masyarakat yang melakukan pembayaran ada yang menitipkan, dari UPT pajak membentuk petugas lapangan (PLD) untuk distribusi PBB 1 dan 2 yang bertugas untuk mendistribusikan SPPT, ada Masyarakat yang membayar kan pajak melalui titipan dikarenakan tidak ada waktu dan ada juga yang langsung membayar ke UPT atau bank langsung sesuai dengan pemerintah tersebut." Serta ada juga pendapat dari wajib pajak Ibu Senah "Sebenarnya untuk kualitas pelayanan baik, Cuma karna saya ngga ngerti bayar langsung kesana atau dengan cara lain jadi saya kurang paham."

3) Kualitas penegakan hukum perpajakan

Dalam melakukan atau membuat peraturan yang baru pemerintah harus melakukan atau membuat sanksi/hukuman untuk Masyarakat yang melanggar atau yang melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak. Untuk kabupaten Bogor sendiri sudah membuat sanksi berupa sistem denda yang akan semakin bertambah berjalan jika tidak secepatnya dibayarkan, hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Desa Bapak Samin. "Jika mereka tidak membayar sampai waktu yang ditentukan per tanggal 31 lebih dari itu atau lewat dari itu ada denda perbulan 2 % max 48 % ditentukan oleh Bappenda selama setahun." Masyarakat khususnya di Desa Ligarmukti lebih memilih membayar denda dari pada membayar tepat waktu. Karna, menurut mereka membayar tepat waktu sama membayar terlambat sama saja. Saksi atau denda yang diberikan oleh pemerintah tidak membuat Masyarakat menjadi jera karna dampak dari menunggak pajak, akan ada keringanan dalam dendanya. Hal ini disampaikan oleh salah satu warga Desa Ligarmukti Ibu Senah. "Biasanya ada denda, tapi kalau saya bayar itu kadang jadi 2 tahun karna sama saja mau nanti juga kan ada penghapusan denda."

4) Kualitas pemeriksaan pajak

Buruknya kualitas pemeriksaan pajak menyebabkan rendahnya tingkat penerimaan pajak yang akan didapatkan pemerintah, Standar pemeriksaan adalah patokan bagi pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan. Hal ini disampaikan oleh Akademis Kampu Bapak Ryan Nugraha, SE, MIDP, BKPR. "Pemeriksaan PBB biasanya dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB dan/atau tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan PBB dilakukan jika terdapat indikasi wajib pajak tidak melaporkan objek pajaknya pengembalian kelebihan pembayaran PBB." Untuk Desa Ligarmukti sendiri dalam melakukan pemeriksaan adalah dengan bantuan petugas desa yang akan melakukan pengecekan data yang telah dikirimkan oleh petugas BAPPENDA untuk kemudian dialihkan ke UPT dan dari UPT dialihkan lagi ke UPTD dan di sebarakan kemasyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Samin sebagai Kepala Desa. "Pemeriksaan yang dilakukan adalah melalui UPT yang akan disampaikan melalui Petugas Lapangan Desa untuk melakukan pemeriksaan."

5) Tinggi rendahnya tarif pajak

Untuk pajak tersendiri di kab Bogor sesuai dengan diberlakukannya tarif pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh Bapak Samin sebagai Kepala Desa “Dilihat dari besaran, pusatkan tergolongnya ada 5 katagori, ada buku 1 sampai 5. Untuk buku satu itu Rp 100.000 kebawah, Buku 2 itu Rp 100.000-Rp 200.000, Buku 3 rp 500.000-Rp1.000.000 dan seterusnya samapai yang oaling tinggi adalah buku 5 yang pembayaran di atas 20 jt. Biasanya Pembda Bogor akan meringankan denda diawal, misalkan tidak perlu bayar denda atau ada potongan denda dari bulan januari sampai bulan maret. Karna untuk menekan orang yang berlomba-lomba membayar pajak diawal.” Tarif pajak bumi dan bangunan adalah 0,5 % dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. 0,10% (nol koma sepuluh perseratus) untuk NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan b. 0,20% (nol koma dua puluh perseratus) untuk NJOP Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih. Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4).

6) Kemauan dan kesadaran wajib pajak

Untuk diwilayah desa Ligarmukti kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat kecil dibuktikan pada presentasi kepatuhan pajak sebesar 61 %. Salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak tidak mencapai 100% di Desa Ligarmukti adalah kurangnya kesadaran wajib pajak akan tanggung jawab untuk melunasi hutang pajak, Hal tersebut terlihat dengan adanya ditemukan wajib pajak yang bersikap acuh tak acuh dengan pajak. seperti yang kita ketahui pajak itu begitu penting demi mendorong kemajuan negara bahkan desa itu sendiri, padahal dana desa tidak akan dialirkan ke desa tersebut jika pembayaran pajaknya bermasalah sehingga kemajuan desa tidak tercapai. Untuk itu Desamenggambil Langkah untuk memsosialisasikan tentang betapa pentingnya pajak dan memberikan informasi tentang pajak. Hal ini disampaikan oleh Bapak Samin sebagai Kepala Desa. “Mensosialisasikan betapa pentingnya untuk membayar pajak untuk membangun desa yang lebih baik.”

7) Perilaku wajib pajak

Masih banyak masyarakat yang abay terhadap pembayaran pajak dikarnakan ketidak tahuan mereka betapa pentingnya dalam membayar pajak untuk kepentingan pembangunan daerah tersebut, sehingga lalai dalam pembayaran pajak. Berbagai macam cara yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya di desa Ligarmukti ini. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Samin. Menyampaikan, menagih dan mengingatkan. Karena walaupun dipaksakan juga sama saja, tergantung pada mereka lagi gimana kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak serta pentingnya dalam membayar pajak, kalua kadang-kadang menakuti padahal kenyataannya misalkan kalua tidak bayar akan diblokir jalannya, sampai sekian tahun tanahnya akan diblokir negara atau dipasung, padahalnya untuk tanah yang diambil negara kan ada ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku yang pasti kita akan menyampaikan seolah-olah menakui supaya Masyarakat paham, dengan cara itu ada efeknya untuk membayar pajak.

2. Hambatan yang dialami oleh Desa Lingarmukti dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran SPPT PBB-P2

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lingarmukti beliau menjelaskan hambatan yang dialami oleh Desa Lingarmukti dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran SPPT PBB P2 adalah sebagai berikut : Tidak ketersediaan uang atau keuangan yang tidak stabil. Kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak yang mempunyai tanah dan tidak mau membayara pajak. Tidak mampu bayar karena tidak berpenghasilan, bankrut, kurang edukasi, tidak tahu cara membayar, enggan atau memang sengaja tidak mau membayar. Upaya yang dapat dilakukan BAPPENDA Kab. Bogor dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran SPPT PBB-P2 di Desa Lingarmukti

3. Adapun upaya yang dapat dilakukan BAPPENDA Kab. Bogor dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran SPPT PBB Di Desa Lingarmukti berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa adalah sebagai berikut : Menyampaikan, menagih dan mengingatkan. Karena walaupun dipaksakan juga sama saja, tergantung pada mereka lagi bagaimana kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak serta pentingnya dalam membayar pajak, kalau kadang-kadang menakuti padahal kenyataannya misalkan kalau tidak bayar akan diblokir jalannya, sampai sekian tahun tanahnya akan diblokir negara atau dipasung, padahalnya untuk tanah yang diambil negara kan ada ketentuan dan perundangan- undangan yang berlaku yang pasti kita akan menyampaikan seolah-olah menakui supaya Masyarakat paham, dengan cara itu ada efeknya untuk membayar pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelum, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Analisis Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Lingarmukti adalah sebagai berikut :

1. Analisis Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kurang baik dilihat dari tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang kurang/belum mencapai 100%, hal ini ditunjukkan dengan presentasi dari tahun 2021-2022 yang tidak ada kenaikan yang tetap hanya 61 % dari total 100%. Walaupun ditemukan terjadinya peningkatan akan tetapi kepatuhan di Desa Lingarmukti tetap termasuk kedalam golongan kurang patuh. Dalam penelitian ini terdapat tujuh faktor yang memengaruhi kepatuhan, kualitas sistem administrasi perpajakan di desa Lingarmukti masih dilakukan secara manual, untuk pelayanannya terbilang bagus karna disana masih menggunakan sistem manual, penegakan hukum yang masih menjalankan denda, pemeriksaan pajak dilakukan oleh petugas desa, tarif pajak sendiri telah diatur dalam peraturan pemerintah, kemauan dan kesadaran Masyarakat yang masih awam tentang pembayaran pajak serta perilaku yang membuat Masyarakat malas membayar pajak.
2. Hambatan yang dihadapi dalam kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya sosialisasi betapa pentingnya membayar pajak dalam Pembangunan desa, sehingga Masyarakat tau akan bahwa pembaguanan desa yangn dilakukan oleh pemerintah itu mendapat dana dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini menyebabkan kurang dipercayanya pemerintah dalam mengelola pendapatan dari pajak tersebut. Selain itu masih banyak masyarakat yang lalai dalam membayar pajak karna ketidaktahuan pengertian pajak tersebut.
3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB adalah melakukan sosialisasi khusus terhadap pemahaman pajak serta uang yang dibayar kan

tersebut uangnya dikelola untuk apa. melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat guna menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta untuk menghindari atau mencegah supaya masyarakat tidak melakukan tindakan pengurangan kesadaran dalam hal membayar pajak. Dengan melakukan penagihan, penjemputan dan meningkatkan kepada masyarakat dari wajib pajak ke wajib pajak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dr. Waluyo, M.Sc., Ak. 2014. Jakarta: Salemba Empat Perpajakan Indonesia Edisi 11. Muhammad, Mulyadi. 2020. Metode Penelitian Praktis Kualitatif Dan Kuantitatif. ed. Rahmayanti Tiktik. Jakarta: Publica institut-Anggota IKAPI.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017a. Rekayasa Sains Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.
- . 2017b. Rekayasa Sains Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal. Resmi, S. 2019. Salemba Empat Perpajakan: Teori Dan Kasus Edisi Revisi.
- Unggul Sagen, Herman Lawelai, Dr . Herman Dema, Sundari, Hardianti, Irawati. 1967. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Metode Penelitian Sub Rumpun Ilmu Politik.
- Amalia, Vina, and Dini Widyawati. 2021. 10 *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Sosialisasi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Rekayasa Sains Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal*.
- Salman, Kautsar Riza, and Heru Tjaraka. 2019. Penerbit Indeks Jakarta Pengantar Perpajakan : Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak.
- Shahab, Nadia Nabila. 2020. 2 *Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret 201 Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan*.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2004. “Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.” PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhardito, Bambang, and Bambang Sudibyo. 1999. *Simposium Nasional Akuntansi Pengaruh Faktor- Faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan*.

Jurnal

- Al-Rahamneh, N. M., Al Zobi, M. K., & Bidin, Z. (2023). The influence of tax transparency on sales tax evasion among Jordanian SMEs: The moderating role of moral obligation. *Cogent Business and Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2220478>
- Andersson Järnberg, L., & Värja, E. (2022). The composition of local government expenditure and income growth: the case of Sweden. *Regional Studies*, 0(0), 1–14. <https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2131755>
- Darmawan, A. (2020). Analisis Atas Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dipengaruhi Oleh Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Berdomisili Di Rw09 Desa Ciherang, Kabupaten Cianjur). *Repository UNIKOM*, 10–24.
- Institut Stiami. (n.d.). pedoman skripsi stiami.

Maulida, M., Wiyono, M. W., & Mudhofar, M. (2019). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Lumajang Tahun 2014 - 2017. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(4), 88–95.

Nasrulloh Huda, M., & Wicaksono, G. (2021). *Daerah Kota Yogyakarta*. 1(4), 284–290.

Nurul Hidayah, A., & Suparno. (2019). ANALISIS PENERAPAN PEMBEBASAN PBB DAN BPHTB TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH (Studi Empiris di UPRD Tanjung Priok).

Jurnal Wahana Akuntansi, 14(1), 101–111. <https://doi.org/10.21009/wahana.14.017> Sachintania, A., Fujianti, D., & Guarti. (2021). *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis) Analisis Efektivitas*

Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Komputerisasi Akuntansi , Politeknik Piksi Ganesha , Indonesia. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 5(2), 561–572.

Shabira, A. H., & Yanti, Y. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Karawang. *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 522–528.

<https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/4449%0Ahttps://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/download/4449/2893>

Web

Bappenda Kab Bogor. (2021). Relaksasi Pajak Daerah 2021. Bappenda Juara. <https://bappenda.bogorkab.go.id/relaksasi-pajak-2021/>

Bappenda Kab Bogor. (2022). Penghapusan Pajak Bumi dan bangunan. 2022. <https://bappenda.bogorkab.go.id/relaksasi-pajak-daerah-2022/>

Bogor, B. K. (2020). Bappenda Juara. Bappenda. <https://bappenda.bogorkab.go.id/>

Bogor dily. (2021). Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021.

Bogor Dily. <https://bogordaily.net/2021/11/publikasi-kinerja-bappenda-kabupaten-bogor/>